

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semenjak era otonomi daerah (otda) bergulir, telah menempatkan DPR maupun DPRD pada posisi stretegis dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui fungsi legislasi, budgeting, kontrol, dan fungsi representasi. Namun pada kenyataannya, kinerja parlemen tersebut belum berjalan dengan maksimal. Dalam bidang legislasi, terbukti dengan minimnya peraturan perundangan yang merupakan inisiatif wakil rakyat. Di DPR RI tahun 2010 menargetkan 70 RUU namun yang selesai hanya 8 UU¹. Selain itu, dalam bidang pengawasan anggaran, DPR RI dinilai kurang merepresentasikan fungsi pengawasan DPR secara maksimal terhadap Anggaran Negara yang mencapai Rp 1.229,5 Triliun pada tahun 2011².

Begitu pula yang terjadi di Jawa Tengah. DPRD Provinsi Jawa Tengah sampai dengan akhir tahun 2010 baru menghasilkan satu perda, yaitu perda tentang retribusi daerah³. Walaupun sebelumnya DPRD Jawa Tengah telah mencanangkan akan menyelesaikan lima peraturan daerah di antaranya, komisi A mengajukan rancangan perda tentang kebebasan informasi publik, komisi B perda tentang pengaturan pasar tradisional dan modern, dan komisi C mengusulkan perda tentang retribusi. selain itu, komisi D menyiapkan perda tentang pengaturan air tanah, dan komisi E mengusulkan perda pendidikan⁴.

Kinerja dalam fungsi Budgeting pun tidak jauh beda, DPRD Provinsi Jawa Tengah dirasa lemah dalam mengkritisi penyusunan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 yang dinilai terlalu boros. Forum Indonesia untuk Transparansi Keuangan (Fitra) Jawa Tengah mencatat dari Rp2,225 triliun rencana anggaran belanja langsung, 71,2 persen atau sekitar Rp1,584 diantaranya digunakan untuk belanja barang dan jasa.

Sedangkan 9,30% atau sekitar Rp 206,9 miliar digunakan untuk belanja pegawai, yakni honor pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai non PNS. Sementara untuk belanja modal yakni peningkatan aset tanah, bangunan dan alat milik pemerintah daerah hanya 19,5% saja, atau sekitar Rp 433,81 miliar⁵. Jika seperti ini, tentu saja yang paling dirugikan adalah rakyat karena rakyat adalah tujuan dari adanya penyelenggaraan pemerintahan. Seharusnya anggaran untuk rakyat yang lebih besar akan memperbesar legitimasi fungsi pemerintahan. Pemerintahan hanyalah alat untuk mensejahterakan rakyat dan akan sangat aneh apabila alatnya justru menjadi penghambat kesejahteraan rakyatnya.

Kurang maksimalnya kinerja dalam bidang legislasi dan budgeting tersebut semestinya tidak terjadi, terlebih ketika DPRD memiliki masa reses sebagai sarana untuk menggali aspirasi dari rakyat. Berdasarkan masukan dari masyarakat yang diserap melalui reses, anggota DPRD dapat memberikan masukan atas persoalan yang semestinya dijadikan perhatian oleh pemerintah daerah, baik sebagai bahan penyusunan peraturan daerah maupun sebagai bahan penyusunan anggaran (APBD). Masukan dari masyarakat atau hasil pengamatan anggota

dewan terhadap kondisi di daerah idealnya menjadi bagian untuk menyusun kebijakan ke depan.

Di sisi lain, kewajiban anggota DPRD Provinsi untuk bertemu dengan konstituen⁶ dan daerah pemilihannya (Dapil)⁷ merupakan tanggungjawab moral dan politis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk MPR, DPR, DPRD, dan DPD) Pasal 300⁸ dan rumusan pasal tersebut diatur oleh peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2014 No. 2 Tahun 2010 BAB VIII Bagian Kedua Pasal 74 tentang Masa Reses⁹.

Idealnya, reses adalah sarana komunikasi politik antara anggota dewan dengan para pemilih (konstituen) di daerah pemilihannya. Komunikasi politik diwujudkan tidak saja dalam bentuk penyerapan aspirasi, menerima pengaduan dan gagasan-gagasan yang berkembang di daerah. Tapi juga dijadikan forum menyampaikan pertanggungjawaban dari anggota dewan yang bersangkutan. Ia akan menjelaskan apa yang sudah dilakukan, bagaimana *follow-up* dari reses sebelumnya serta apa agenda strategis yang akan dilakukan ke depan.

Terlebih dengan melihat besaran anggaran dana reses yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2009 anggaran reses untuk DPRD Jawa Tengah sebesar Rp. 12.555.993.000 atau 21,15 % dari total belanja langsung sekretariat dewan (Rp. 59.358.056.000). Anggaran tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun

sebelumnya sebesar Rp. 154.993.000. sementara pada tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp.12.556.893¹⁰.

Namun demikian, besarnya anggaran pada tahun 2010 di atas tidak terdapat anggaran yang dipergunakan untuk uang transportasi bagi konstituen yang datang dalam acara reses karena Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak lagi mengatur mengenai kegiatan reses para wakil rakyat. Bahkan, hal itu sudah dikonsultasikan ke Departemen Dalam Negeri¹¹. Hal ini tentu saja berbeda dengan pelaksanaan reses pada periode sebelumnya dimana setiap konstituen yang hadir dalam kegiatan reses akan diberikan uang saku sebesar Rp. 75.000,-¹². Ketiadaan uang transport ini ditengarai bisa mengganggu pelaksanaan kegiatan reses itu sendiri karena kebanyakan masyarakat enggan menghadiri reses anggota dewan tanpa ada dana pengganti transportasi¹³.

Menurut Abdul Fikri Faqih yang merupakan salah satu pimpinan DPRD Jateng, mengatakan bahwa persoalan ketiadaan uang transport akan berpengaruh pada kegiatan reses. Sebab selama ini setiap kegiatan penyerapan aspirasi selalu ada uang transport bagi peserta. "Anggota Dewan harus pintar-pintar menjelaskan kepada konstituen. Jangan sampai kebijakan ini memunculkan pandangan negatif, seperti uang digunakan dewan, atau tidak ikut kegiatan karena tak ada uang transport"¹⁴.

Menyikapi hal tersebut, sejumlah anggota dewan memilih untuk tetap mengeluarkan uang sebagai ganti uang transport walaupun sudah tidak ada dalam anggaran, karena masyarakat enggan mengikuti kegiatan reses tanpa ada dana transportasi. Sukirman, anggota DPRD dari PKB misalnya, menganggap kegiatan

reses ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ataupun untuk anggota DPRD itu sendiri. Dengan reses, bisa diketahui kondisi persis di lapangan, termasuk keluhan yang datang dari masyarakat. Agar tidak mengecewakan warga, Sukirman “nomboki” biaya transport untuk peserta reses¹⁵.

Lain lagi pendapat yang disampaikan Adi Rustanto, anggota komisi A DPRD Prov. Jateng ini mengatakan tanpa adanya alokasi uang transport bagi konstituen, ia tetap optimis reses dapat dilaksanakan. Menurutnya, kegiatan reses tidak harus mengikutsertakan konstituen partainya. Reses bisa dilakukan di sekolah yang tentunya para siswa tidak meminta uang saku¹⁶.

Fenomena di atas bisa dilihat sebagai upaya anggota DPRD dalam menyikapi kebijakan baru agar secara legal formal kegiatan reses tersebut dapat dilaksanakan. Memang sejauh ini anggota DPRD memiliki kesempatan untuk mengetahui kondisi di Jateng melalui Inspeksi Lapangan (Silap). Namun, karena keterbatasan jadwal dan waktu tidak banyak tempat dapat dikunjungi. Selain itu, Silap juga lebih banyak melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu.

Namun ternyata ada fakta yang lebih ironis dilakukan oleh Mustofa, anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah ini sejak dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, ia jarang sekali mengikuti kegiatan kedewanan termasuk reses¹⁷. Bahkan setelah terkuak keterlibatannya sebagai tersangka kasus penipuan CPNS bersama anggota dewan lainnya, Mustofa tidak pernah terlihat aktivitasnya di DPRD Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini¹⁸. Jamal Yazid, Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah mengaku sudah berupaya

mencari keberadaan Mustofa, akan tetapi yang bersangkutan belum ditemukan dan lima nomer telepon genggamnya tidak aktif ketika dihubungi¹⁹.

Kasus lainnya, adalah ketika Ketua DPR RI Marzuki Alie melontarkan ide untuk membubarkan KPK²⁰. Boleh jadi, maksud Marzuki ingin mengoreksi kinerja lembaga antikorupsi itu. Tetapi dia lupa bagaimana seorang pemimpin harus memahami cara berkomunikasi yang efektif dan elegan. Ketika dikonfirmasi seputar pernyataan kontroversialnya, jawaban Marzuki selalu berlandung dibalik kebebasan berpendapat dalam negara yang berdemokrasi.

Dian Muhtadiah²¹ menyebut, pernyataan kontroversial yang terus menerus dilakukan adalah bentuk propaganda yang mengindikasikan bahwa posisi politik seseorang dapat saja bebas bicara meski itu berimplikasi negatif. Pembiaran gaya komunikasi politik seperti ini bisa menjadi preseden buruk dalam alam demokrasi negara kita. Seandainya yang melakukan itu adalah seorang warga sipil biasa, tentu tidak ada yang peduli. Tetapi yang melakukannya adalah anggota legislatif. Selayaknya mereka harus pandai mengkomunikasikan argumentasi dan mampu mempersuasi orang.

Gaya komunikasi inilah yang seharusnya tidak dilakukan oleh anggota DPRD. Sebetulnya buruknya gaya komunikasi anggota legislatif di Indonesia sudah jamak terjadi. Maka tak heran bila Erna Suminar²² menyebut politisi sebagai salah satu kelompok orang yang paling aneh di Indonesia. Persahabatan, interaksi dan gaya komunikasi mereka multitafsir dan serba remang-remang. Karenanya gaya komunikasi politisi, seperti lukisan abstrak, yang menyediakan lahan untuk ditafsirkan apa saja, kusut dan ruwet yang tentu saja sangat aman,

menguntungkan bagi dirinya dan kroni-nya. Kita dapat melihatnya dari cara kerja mereka dalam mendorong penegakan hukum untuk mengungkap kasus bank Century, kasus Pengadaan Wisma Atlit, dan kasus-kasus besar lainnya seakan begitu rumitnya sehingga memakan waktu panjang dan berbelit-belit dan tidak selesai sampai sekarang.

Mungkin bagi sebagian wakil rakyat banyak peristiwa dan persoalan yang bertubi-tubi menikam negeri ini tak lebih dari sebuah “komedi”, namun bagi rakyat, ini adalah tragedi. Seharusnya, anggota DPR maupun DPRD memiliki gaya komunikasi yang efektif dan efisien dalam melakukan komunikasi politik. Ketika ia terkena masalah harus dihadapi dan di selesaikan dengan cepat sehingga tidak mengganggu tugas-tugas kedewanan.

Oleh karena itu, penelitian tentang Gaya Komunikasi Politik Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah pada saat reses ini penting untuk dilakukan. Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang diperoleh bagi setiap anggota DPRD pada saat reses serta persoalan ketidakmaksimalan fungsi DPRD sehingga mereka berupaya dengan gaya komunikasi masing-masing untuk memaksimalkan kegiatan reses tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Sebagai lembaga legislatif, DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi pengawasan, anggaran, dan kontrol. Namun, memasuki paruh kedua jabatan mereka belum menunjukkan kualitas kinerja yang lebih baik.

Masalah di atas seharusnya tidak perlu terjadi jika anggota DPRD mampu melaksanakan secara maksimal kegiatan reses yang dilakukan selama tiga kali seminggu dalam setahun. Kegiatan Reses yang seharusnya dijadikan sebagai sarana untuk menjangkau aspirasi rakyat yang kelak akan diperjuangkan DPRD dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tertuang dalam APBD belum dilaksanakan secara maksimal.

Kenyataannya, reses hanya dijadikan sebagai ajang "pulang kampung" dan silaturahmi dengan para pengurus partai politik di daerah. Kalaupun dilaksanakan forum terbuka dengan konstituennya, itu pun hanya dalam rangka konsolidasi internal untuk agenda politik tertentu seperti Pilkada.

Ketiadaan dana transportasi bagi konstituen yang diatur dalam UUU 27 tahun 2009 juga membuat anggota DPRD melakukan upaya sedemikian rupa untuk memaksimalkan kegiatan reses, baik itu harus "nomboki" atau melakukan kegiatan reses yang sesederhana mungkin. Faktor ini seharusnya bukan menjadi penghalang sukses tidaknya kegiatan reses yang dilakukan selama ini.

Di sisi lain, buruknya gaya komunikasi yang dilakukan oleh anggota DPR maupun DPRD yang terkesan multitafsir dan serba remang-remang apalagi ketika banyaknya mereka yang terjerat kasus-kasus hukum makin mengganggu kinerja mereka di parlemen.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang ingin penulis lihat adalah: Bagaimana gaya komunikasi politik Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan Reses di daerah pemilihannya dan apa faktor-faktor penghambat gaya komunikasi politik tersebut ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah merupakan jawaban dari masalah penelitian sehingga segala permasalahan yang ada diharapkan dapat terurai dan tercapai kondisi ideal sesuai yang diharapkan. Dari perumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan gaya komunikasi politik dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat komunikasi politik yang dihadapi pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap konstituen di daerah pemilihannya pada masa reses.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan memperkaya khasanah kajian komunikasi politik (*political communication*), yang masih merupakan sebuah konsep kajian yang relatif baru.

Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan dan pengetahuan baru serta memberikan pemahaman kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk meningkatkan tanggungjawabnya terhadap masyarakat, khususnya pada konstituen di daerah pemilihannya.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Penelitian Sebelumnya

Dari sejumlah literatur, terdapat beberapa penelitian tentang Gaya Komunikasi Politik maupun tentang Reses DPRD. Pertama, penelitian tentang Bahasa Militer dalam Komunikasi Politik SBY oleh Anita Kuswandari²³. Dalam Penelitian ini

memfokuskan wacana dan teks yang mempromosikan ideologi yang di bawa SBY, untuk membangun dan memelihara kekuasaan. Hasil penelitian ini terungkap bahwa pesan dalam teks transkrip pidato pengarah dan sambutan Presiden SBY yang didokumentasikan oleh Biro Pers dan Media Kepresidenan. SBY memperkenalkan nilai baru dalam bahasa militer yaitu : perdamaian, profesionalisme, dan koalisi. Nilai-nilai Orde baru yang mengalami perubahan makna adalah : normalisasi, demokrasi, dan pembangunan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa SBY mengusung nilai-nilai baru dalam kemiliteran. Ideologi baru melalui teks-teks pidato yang disampaikan, untuk dapat diterima dan untuk mendominasi seluruh masyarakatnya. Ideologi ini termasuk nilai-nilai militer yang secara hegemoni ditekankan pada makna positif sesuai nilai yang diterima oleh masyarakatnya.

Penelitian lain dilakukan oleh Prof. Dr Tjipta Lesmana, MBA (2009), berjudul "Dari Soekarno sampai SBY, Intrik & Lobi Politik Para Pengusaha". Penelitian ini menguak pola komunikasi politik enam presiden yang pernah memimpin Indonesia, dari Soekarno sampai Susilo Bambang Yudoyono (SBY).

Presiden Soekarno memiliki gaya komunikasi dimana lebih banyak berbicara dengan bahasa lugas. Maksudnya, perkataan yang diucapkan Soekarno bersifat apa adanya. Contohnya, slogan "Ganyang Malaysia!", sebuah slogan yang sangat sederhana namun memiliki makna yang mudah di pahami rakyat. Gaya berbeda dilakukan Soeharto yang lebih cenderung dalam gaya komunikasi tingkat tinggi dan bersifat situasional. Dengan gaya seperti ini, banyak menteri yang harus menafsirkan sendiri setiap perkataannya. Karena kata yang diucapkan selalu

membuat bawahannya berpikir. Sementara, B.J. Habibie memiliki kecenderungan kuat dengan bahasa tubuh dan emosional. Ia memiliki wacana luas, namun sedikit arogan. Habibie terkenal juga karena tidak mempunyai selera humor.

Hal di atas berkebalikan dengan Gus Dur yang cenderung tidak memiliki pola komunikasi yang jelas namun sering menggetarkan komunikan. Hal itu karena Gus Dur berlatar belakang pesantren dan meskipun sudah menjadi presiden kadang menempatkan dirinya sebagai kiai.

Berbeda pula dengan Megawati yang lebih cenderung *easy going* dan tidak mau repot melihat permasalahan yang terjadi pada menteri. Sebagai presiden yang diikat protokoler, ia lebih sering mendiskusikan persoalan pribadi dibandingkan dengan persoalan kenegaraan. Namun ia mudah emosional ketika menghadapi persoalan.

Sedangkan Presiden SBY pola komunikasinya sering membingungkan dan kurang jelas dalam setiap ucapannya sehingga banyak kalangan menilainya sebagai sosok peragu. SBY adalah sosok ekstra hati-hati dalam mengeluarkan pendapat, yang membuatnya terkesan bimbang.

Perbedaan pola keenam presiden RI dimungkinkan terjadi karena setiap Kepala Negara hidup dan mengalami didikan berbeda satu sama lain. Mengacu pada berbagai indikator, dapat digolongkan jika setiap presiden memiliki corak kepemimpinan berbeda. Begitu pula sikapnya berkomunikasi dalam merespon berbagai kritik yang disampaikan lawan politiknya.

Penelitian lainnya, Sidiq Suhada (2009) yang meneliti tentang gaya komunikasi politik Prabowo Subianto pada saat berkapasitas sebagai komunikator

dalam menyampaikan pesan untuk mempengaruhi khalayak. Menurut Sidiq, keberhasilan komunikator dalam mempengaruhi khalayak agar bersedia memberikan dukungan (suara) kepadanya, salah satunya adalah karena kepiawaian komunikator dalam menyampaikan pesan. Termasuk pemilihan kata dan bahasa guna membingkai pesan agar semakin menarik khalayak.

Dalam penelitian ini terungkap bahwa latar belakang keluarga yang membentuk karakteristik pribadi Prabowo, hingga aneka polemik masalah yang menyelimutinya di penghujung karier militernya, serta situasi kontemporer yang berkembang ternyata membentuk gaya komunikasi politik komunikator tersebut. Walaupun gaya komunikasi politik Prabowo bukan saja terbentuk secara alamiah, namun juga dengan sengaja dibentuk secara ilmiah untuk tujuan pencitraan dirinya.

Sedangkan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Reses yang dilakukan oleh Wahid Abdurrahman²⁴ terungkap bahwa : (1) Persiapan kegiatan reses (penentuan waktu, lokasi, dan peserta) lebih mempertimbangkan konsep kemudahan, belum memperhatikan aspek keterwakilan masyarakat, (2) Belum adanya koordinasi dengan SKPD kab/kota ataupun anggota dewan lainnya dalam pelaksanaan reses, (3) Laporan hasil reses belum disusun dengan baik, (4) Belum banyak pemberitaan di media massa mengenai hasil reses, (5) Pengelolaan dokumen hasil reses belum dilakukan secara optimal, (6) Belum ada tindak lanjut kongkrit dari hasil reses.

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Rozi Dateno P. Hanida, SIP dari Universitas Andalas Padang yang melakukan penelitian tentang Bentuk

Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Konstituen Di Daerah Pemilihannya (Studi Deskriptif Kegiatan Masa Reses I dan II Tahun 2005 Anggota DPRD Kota Padang).

Dalam Penelitian Rozi tersebut terungkap bahwa bentuk komunikasi politik yang terjadi adalah tatap muka serta melakukan dialog dan kunjungan ke lapangan. Sedangkan faktor yang dapat menjadi penghambat komunikasi politik ini berupa kurangnya partisipasi masyarakat, dana yang terbatas, waktu dan sarana yang terbatas, kesibukan anggota DPRD.

Maka dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang Gaya Komunikasi Politik Anggota DPRD Pada saat Reses. Sebagai seorang politisi, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pastilah melakukan komunikasi politik dengan konstituennya secara berkala yang diatur dalam kegiatan reses. Dalam proses inilah mereka menggunakan gaya komunikasi yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Di sisi lain, terdapat perbedaan antara kegiatan reses dengan kegiatan politik pada umumnya. Biasanya dalam kegiatan politik pada umumnya seorang politisi melakukan persuasi kepada *audience* guna melakukan tindakan-tindakan politik. Sedangkan pada saat reses lebih ditekankan kepada saling tukar informasi antara anggota DPRD dengan konstituennya.

Inilah yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak saja meneliti tentang gaya komunikasi politik secara umum yang melekat pada komunikator politik ataupun evaluasi kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD.

1.5.2. Paradigma Penelitian

Penelitian tentang Gaya Komunikasi Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah pada saat Reses ini menggunakan paradigma Postpositivisme (Guba & Lincoln, 2000). Menurut Guba, Postpositivisme mempunyai ciri utama sebagai suatu modifikasi dari Positivisme. Melihat banyaknya kekurangan pada Positivisme menyebabkan para pendukung Postpositivisme berupaya memperkecil kelemahan tersebut dan menyesuaikannya. Prediksi dan kontrol tetap menjadi tujuan dari Postpositivisme tersebut.

Terdapat empat karakteristik utama dari post-positivisme. Pertama, fakta tidak bebas melainkan bermuatan teori. Kedua, Falibilitas teori. Tidak satu teori pun yang dapat sepenuhnya dijelaskan dengan bukti-bukti empiris. Ketiga, fakta tidak bebas melainkan penuh dengan nilai. Keempat, interaksi antara subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian bukanlah reportase objektif melainkan hasil interaksi manusia dan semesta yang penuh dengan persoalan dan senantiasa berubah.

Secara ontologis paradigma postpositivistik meyakini adanya kebenaran bersifat tidak hanya satu tetapi lebih kompleks, sehingga tidak dapat diikat oleh satu teori tertentu saja dan dikonstruksi oleh manusia yang memiliki kepentingan. Dalam kata lain, secara onotologi, realitas dipandang secara kritis – artinya realitas itu memang ada, tetapi tidak akan pernah dapat dipahami sepenuhnya. Realitas diatur oleh hukum-hukum alam yang tidak dipahami secara sempurna. Realisme seperti ini dicirikan dengan gagasan dengan subyek peneliti tidak akan

bisa mengerti realitas secara utuh, begitupun dengan mekanisme dunia sosial tidak akan bisa ditangkap secara penuh.

Dengan demikian, ontologi post-positivisme menyakini bahwa fenomena sosial memiliki pola-pola alamiah proses konstruksi sosial dan memiliki dampak umum yang dapat diprediksi. Dalam penelitian ini realitas yang ingin dicari adalah gaya komunikasi pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah pada saat reses dalam kerangka dasar teori retorika yang dikemukakan oleh Fisher.

Selanjutnya berdasarkan kaidah epistemologi maka peneliti dalam mencari kebenaran, peneliti harus berinteraksi dengan objek yang diteliti. Dimana seorang peneliti harus melihat setiap peristiwa dipandang secara utuh dalam konteks keseluruhannya, tidak diparsialkan. Dalam pengumpulan data penelitian tentang gaya komunikasi pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah pada saat Reses ini menggunakan alat penelitian berupa wawancara mendalam kepada nara sumber yang terlibat langsung pada saat kegiatan reses, observasi peneliti pada masing-masing objek penelitian, dan sumber data lain dari kepustakaan.

Kemudian secara metodologi maka metode penelitian yang digunakan dalam paradigma pospositivistik tersebut adalah metodologi pendekatan eksperimental yang melalui observasi dipandang tidak mencukupi, tetapi harus dilengkapi dengan triangulasi, yaitu penggunaan beragam metode, sumber data, periset dan teori.

1.5.3. Tradisi Retorika

Salah satu bentuk dalam komunikasi politik adalah Retorika. Retorika berasal dari bahasa Yunani, *rhetorica*, yang berarti seni berbicara. Pada awalnya, retorika digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang pengadilan, atau dalam perdebatan-perdebatan antarpersonal. Oleh sebab itu, pada awalnya retorika adalah komunikasi yang bersifat dua arah atau dialogis, yaitu antara satu dengan satu yang lain. Atau satu orang berbicara dengan satu orang atau beberapa orang, untuk saling mempengaruhi dengan secara persuasif dan timbal balik (dua arah). Itulah sebabnya retorika pada awalnya dikembangkan sebagai kegiatan seni, yaitu seni berbicara.

Tradisi retorika memberi perhatian pada aspek proses pembuatan pesan atau simbol. Prinsip utama disini adalah bagaimana menggunakan simbol yang tepat dalam menyampaikan maksud. Prinsip bahwa pesan yang tepat akan dapat mencapai maksud komunikator. Kemampuan dalam merancang pesan yang memadai menjadi perhatian yang penting dalam kajian komunikasi. Tradisi retorika dapat menjelaskan baik dalam konteks komunikasi antar personal maupun komunikasi massa. Sepanjang memberi perhatian terhadap bagaimana proses-proses merancang isi pesan yang memadai sehingga proses komunikasi dapat berlangsung secara efektif.

Faktor-faktor nilai, ideologi, budaya, dan sebagainya yang hidup dalam suatu organisasi media atau dalam diri individu merupakan faktor yang menentukan dalam proses pembuatan pesan. Bahwa pesan dihasilkan melalui

proses yang melibatkan nilai-nilai, kepentingan, pandangan hidup tertentu dari manusia yang menghasilkan pesan. Pemahaman yang memadai dari tradisi retorika ini akan membantu dalam memahami bagaimana merancang suatu pesan yang efektif. Hitler sendiri memberi definisi bahwa retorika adalah pers yang tidak tertulis, tetapi dipidatokan sebagai media propaganda untuk membentuk pendapat umum.

Retorika menurut Plato adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi, mengurangi jiwa manusia secara positif ke arah kebenaran, dan menekan jiwa-jiwa manusia. Plato menekankan bahwa orator atau komunikator di dalam mengucapkan kata atau suatu kalimat, baik secara implisit senantiasa harus berpedoman pada dasar-dasar yang didalamnya terdapat kebenaran dan kebijakan. Dalam hal ini, Nimmo membagi retorika menjadi tiga tipe yaitu : (a) Retorika Deliberatif, (b) Retorika Forensik, (c) Retorika Demonstratif.

Retorika Deliberatif dirancang untuk mempengaruhi orang dalam masalah kebijakan pemerintah dengan menggambarkan keuntungan dan kerugian dari cara-cara alternatif dalam melakukan sesuatu. Retorika Forensik berfokus kepada apa yang terjadi pada masa lalu untuk menunjukkan kejadian-kejadian yang terdahulu. Retorika Demonstratif terfokus kepada apa yang terjadi pada masa sekarang. Retorika demonstratif adalah wacana yang memuji dan atau menjatuhkan, tujuannya untuk memperkuat sifat baik dan buruk seseorang, suatu lembaga, gagasan atau ide.

Sedangkan Anwar Arifin membagi Pidato politik ke dalam empat jenis pidato, yaitu (1) *impromptu*; (2) *memoriter*; (3) manuskrip; dan (4) *ekstempore*. (Arifin, 2003:69-70).

Jenis yang pertama (*impromptu*) adalah pidato yang diucapkan secara spontan tanpa persiapan sebelumnya. *Impromptu* lebih mengungkapkan perasaan pembicara yang sebenarnya, gagasan dan pendapat, tampak segar dan hidup, dan memungkinkan seseorang untuk berpikir untuk menyusun kalimat. Namun, bagi yang tidak berpengalaman dapat mengakibatkan penyampaian tersendat-sendat, gagasan yang disampaikan bisa acak-acakan dan kemungkinan besar akan mengalami demam panggung.

Sebaliknya, manuskrip adalah pidato yang dipersiapkan secara tertulis, atau pidato dengan naskah. Manuskrip diperlukan oleh tokoh-tokoh nasional, sebab kesalahan satu kata saja dapat menimbulkan kekacauan dan berakibat jelek bagi pembicara. Manuskrip sering juga dilakukan oleh ilmuwan yang melaporkan hasil penelitiannya dalam pertemuan ilmiah. Berpidato di radio dapat menggunakan manuskrip karena pembicara tidak terikat oleh pendengar.

Sedangkan *memoriter* adalah pidato yang tertulis dan kemudian diingat kata demi kata (dihafal). Seperti manuskrip, *memoriter* memungkinkan ungkapan yang tepat, organisasi yang berencana, pemilihan bahasa yang teliti, gerak, dan isyarat diintegrasikan dengan uraian. Akan tetapi, bahaya terbesar biasanya timbul bila suatu kata atau lebih hilang dari ingatan. Seperti manuskrip, naskah *memoriter* harus ditulis dengan gaya ungkapan.

Jenis pidato yang paling baik dan paling sering digunakan adalah jenis *Ekstempore*, yaitu pidato yang dipersiapkan sebelumnya berupa garis besar dan pokok penunjang pembahasan. Akan tetapi, pembicara tidak berusaha mengingat kata demi kata. Garis besar itu hanya merupakan pedoman untuk mengatur gagasan yang ada dalam pikiran. Namun demikian, keberhasilan pidato politik sangat ditentukan oleh komunikatornya.

Pada perkembangannya di era modern sekarang ini fokus dari retorika telah diperluas bahkan lebih mencakup segala cara manusia dalam menggunakan simbol untuk mempengaruhi lingkungan di sekitarnya dan untuk membangun dunia tempat mereka tinggal. (Littlejohn, 2009: 73).

Lebih lanjut Littlejohn menjelaskan bahwa pusat dari tradisi retorika adalah penemuan, penyusunan, gaya, penyampaian, dan daya ingat. Dalam perkembangannya, penemuan sekarang mengacu pada konseptualisasi, proses dimana kita menentukan makna dari simbol melalui interpretasi, respon terhadap fakta yang berupa penafsiran.

Penyusunan, adalah pengaturan simbol-simbol (informasi) dalam hubungannya dengan orang-orang, dan konteks yang terkait. Sedangkan Gaya berhubungan dengan semua anggapan yang terkait dalam penyajian simbol-simbol tersebut, mulai dari memilih sistem simbol, sampai makna yang kita berikan pada semua simbol tersebut, mulai dari kata dan tindakan sampai busana dan perabotan.

Penyampaian menjadi perwujudan dari simbol dalam bentuk fisik, mencakup pilihan non verbal untuk berbicara, menulis, dan memediasikan pesan.

Terakhir, daya ingat tidak lagi mengacu pada penghapalan pidato, tetapi dengan cakupan yang lebih besar dalam mengingat budaya sebagaimana dengan proses persepsi yang berpengaruh pada bagaimana kita menyimpan dan mengolah informasi. Di era kontemporer, retorika adalah sebuah cara untuk mengetahui dunia, bukan cara untuk menyampaikan sesuatu tentang dunia. (Littlejohn, 2009: 75).

Dalam Tradisi Retorika, Richard West dan Lynn H. Turner (2008;1) membagi empat teori retorika yaitu ; (1) Teori Retorika klasik (Aristoteles), (2) Dramatisme (Burke), (3) Paradigma Naratif (Fisher), dan (4) kajian budaya (Hall).

Teori retorika Aristoteles berpusat pada pemikiran mengenai retorika, yang disebut Aristoteles sebagai alat persuasi yang tersedia. Maksudnya, seorang pembicara yang tertarik untuk membujuk khalayaknya harus mempertimbangkan tiga bukti retorik: logika (logos), emosi (pathos) dan etika/kredibilitas (ethos). Khalayak merupakan kunci dari persuasi yang efektif, dan silogisme retorik, yang memandang khalayak untuk menemukan sendiri potongan-potongan yang hilang dari suatu pidato, digunakan dalam persuasi. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa teori retorika adalah teori yang memberikan petunjuk untuk menyusun sebuah presentasi atau pidato persuasif yang efektif dengan menggunakan alat-alat persuasi yang tersedia.

Kedua adalah teori Dramatisme dari Burke. Teori dramatisme adalah teori yang mencoba memahami tindakan kehidupan manusia sebagai drama. Dramatisme, sesuai dengan namanya, mengonseptualisasikan kehidupan sebagai sebuah drama, menempatkan suatu fokus kritik pada adegan yang diperlihatkan

oleh berbagai pemain. Seperti dalam drama, adegan dalam kehidupan adalah penting dalam menyingkap motivasi manusia. Dramatisme memberikan kepada kita sebuah metode yang sesuai untuk membahas tindakan komunikasi antara teks dan khalayak untuk teks, serta tindakan di dalam teks itu sendiri.

Drama adalah metafora yang berguna bagi ide-ide Burke untuk tiga alasan: (1) drama menghasilkan cakupan yang luas, dan Burke tidak membuat klaim yang terbatas; tujuannya adalah untuk berteori mengenai keseluruhan pengalaman manusia. Metafora dramatis khususnya berguna dalam menggambarkan hubungan manusia karena didasarkan pada interaksi atau dialog. (2) drama cenderung untuk mengikuti tipe-tipe atau genre yang mudah dikenali: komedi, musical, melodrama dan lainnya. Burke merasa bahwa cara kita membentuk dan menggunakan bahasa dapat berhubungan dengan cara drama manusia ini dimainkan. (3) drama selalu ditujukan pada khalayak. Drama dalam hal ini bersifat retorik. Burke memandang sastra sebagai “peralatan untuk hidup”, artinya bahwa literature atau teks berbicara pada pengalaman hidup orang dan masalah serta memberikan reaksi untuk menghadapi pengalaman ini. Dengan demikian, kajian dramatisme mempelajari cara-cara dimana bahasa dan penggunaannya berhubungan dengan khalayak.

Ketiga, adalah Teori Paradigma Naratif dari Fisher. Paradigma naratif melihat khalayak sebagai partisipan dalam suatu pengalaman penceritaan kisah. Para teoritikus naratif menyatakan bahwa kisah seseorang akan efektif jika berkaitan dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan pendengar.

Terakhir, Teori Kajian Budaya. Kajian budaya adalah perspektif teoritis yang berfokus bagaimana budaya dipengaruhi oleh budaya yang kuat dan dominan. Hall (1989) menyatakan bahwa media merupakan alat yang kuat bagi kaum elite. Media berfungsi untuk mengkomunikasikan cara-cara berfikir yang dominan, tanpa mempedulikan efektifitas pemikiran tersebut. Media merepresentasikan ideologi dari kelas yang dominan didalam masyarakat. Karena media dikontrol oleh korporasi (kaum elite), informasi yang ditampilkan kepada publik juga pada akhirnya dipengaruhi dan ditargetkan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan. Pengaruh media dan peranan kekuasaan harus dipertimbangkan ketika menginterpretasikan suatu budaya.

Dari empat teori tentang retorika di atas, maka teori paradigma naratif dipandang peneliti adalah yang sesuai dengan penelitian ini. Karena merujuk pada Paradigma naratif, konstituen yang mengikuti kegiatan reses adalah sebagai partisipan dalam suatu pengalaman penceritaan kisah atau informasi yang dikemukakan oleh anggota DPRD dalam kegiatan reses. Dalam Paradigma Naratif juga melihat bahwa informasi yang disampaikan oleh anggota DPRD itu efektif karena berkaitan langsung dengan konstituen. Misalnya masalah aspirasi yang akan diperjuangkan oleh anggota DPRD ataupun cerita tentang proses pengajuan bantuan sosial yang sangat dibutuhkan oleh konstituen.

1.5.4. Teori paradigma Naratif

Paradigma naratif menurut Fisher adalah mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seseorang pencerita dan bahwa pertimbangan akal ini, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Manusia lebih mudah terbujuk

oleh sebuah cerita yang bagus daripada argumen yang baik. Paradigm naratif mengkonsepkan bahwa manusia adalah pencerita dan manusia mengalami kehidupan dalam suatu bentuk narasi. (West, 2008 :46).

Fisher menjelaskan bahwa logika narasi lebih dipilih dibandingkan logika tradisional yang digunakan dalam argumentasi. Logika narasi (logika dari pemikiran yang luas), menyatakan bahwa orang menilai kredibilitas pembicara melalui apakah ceritanya runtut (mempunyai koherensi) dan terdengar benar (mempunyai ketepatan). Paradigm naratif memungkinkan sebuah penilaian demokratis terhadap pembicara karena tidak ada seorang pun yang harus dilatih secara khusus agar mampu menarik kesimpulan berdasarkan konsep koherensi dan kebenaran.

Asumsi Paradigma Naratif bertolak belakang dengan paradigma dunia rasional, sebagaimana kedua logika tersebut berbeda. Fisher menyatakan lima asumsi dasar dari teori paradigma ini adalah (1) Manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita, (2) keputusan mengenai harga diri dari sebuah cerita didasarkan pada “pertimbangan yang sehat”, (3) Pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter, (4) rasionalitas didasarkan pada penilaian orang mengenai konsistensi dan kebenaran sebuah cerita, (5) kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi dengan cerita, dan kita harus memilih dari cerita yang ada. (West, 2008 :46).

Pertama, Paradigma naratif berasumsi bahwa sifat esensial dari manusia berakar dalam cerita dan bercerita. Cerita menggerakkan manusia, dan membentuk dasar untuk keyakinan serta tindakan seseorang. Fisher juga

meyakinai asumsi pertama ini karena naratif bersifat universal yang dapat ditemukan dalam semua budaya dan periode waktu. Dalam hal ini Fisher menyatakan bahwa etika manapun apakah sosial, politis, hukum atau lainnya, melibatkan naratif. (West, 2008 :47).

Asumsi kedua dari paradigma naratif menyatakan bahwa orang membuat keputusan mengenai cerita mana yang akan diterima dan mana yang ditolak berdasarkan apa yang masuk akal bagi dirinya, atau pertimbangan yang sehat. Asumsi ini menyadari bahwa tidak semua cerita setara dalam hal efektivitas, sebaliknya faktor yang mempengaruhi keputusan untuk memilih cerita merupakan kode argumen yang lebih personal dibandingkan abstrak, atau yang disebut sebagai pemikiran yang logis.

Asumsi yang ketiga berkaitan dengan apa yang secara khusus mempengaruhi pilihan orang dan memberikan alasan yang baik untuk mereka. Paradigma naratif menyatakan bahwa kemasukakalan bukanlah satu-satunya cara untuk mengevaluasi pikiran yang logis. Bahkan kemasuk akalan mungkin bukan merupakan cara akurat untuk mendiskripsikan bagaimana orang membuat penilaian ini. Paradigma naratif mengasumsikan bahwa rasionaitas naratif dipengaruhi oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter.

Asumsi keempat membentuk masalah inti dari paradigma naratif. Asumsi ini menyatakan bahwa orang mempercayai cerita selama cerita terlihat konsisten secara internal dan dapat dipercaya.

Terakhir, perspektif Fisher didasarkan pada asumsi bahwa dunia adalah sekumpulan cerita, dan ketika kita memilih diantara cerita-cerita tersebut, kita

mengalami kehidupan yang berbeda, memungkinkan kita untuk menciptakan ulang kehidupan kita.

Lebih lanjut Fisher menjelaskan Konsep Kunci dalam Pendekatan Naratif yang membentuk inti dari kerangka pendekatan naratif, yaitu ; (1) Narasi, (2) Rasionalitas naratif, (3) Koherensi, (4) Kebenaran, (5) Logika dengan pertimbangan yang sehat.

Narasi, adalah deskripsi verbal atau nonverbal apapun dengan urutan kejadian yang oleh para pendengar diberi makna. Rasionalitas naratif, adalah standar untuk menilai cerita mana yang dipercayai dan mana yang diabaikan.

Koherensi, adalah konsistensi internal dari sebuah naratif. Tiga tipe konsistensi dalam koherensi, yaitu: (a) Koherensi struktural yang berpijak pada tingkatan dimana elemen-elemen dari sebuah cerita mengalir dengan lancar, (b) koherensi material yang merujuk pada tingkat kongruensi antara satu cerita dengan cerita lainnya yang sepertinya berkaitan dengan cerita tersebut, dan (c) koherensi karakterologis yang merujuk pada dapat dipercaya karakter-karakter didalam sebuah cerita.

Kerangka selanjutnya adalah kebenaran yaitu reliabilitas dari sebuah cerita. Terakhir, logika dengan pertimbangan yang sehat, adalah seperangkat nilai untuk menerima suatu cerita sebagai benar dan berharga untuk diterima: memberikan suatu metode untuk menikai kebenaran. Hal ini berarti bahwa pertimbangan yang sehat manapun setara dengan yang lainnya: ini berarti bahwa apapun yang mendorong orang untuk percaya sebuah naratif tergantung pada nilai atau konsepsi yang baik.

1.5.5. Komunikasi Politik

Reses adalah salah satu bentuk komunikasi politik yang terjalin antara anggota DPRD yang menjadi komunikator dengan konstituen yang menjadi komunikannya. Menurut Dan Nimmo, komunikasi politik adalah kegiatan yang bersifat politis atas dasar konsekuensi aktual dan potensial, yang menata perilaku individu dalam kondisi konflik. (Nimmo, 2005:9).

Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapai segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijakan (*policy*) harus ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut adalah proses komunikasi.

Begitu juga dalam kegiatan reses, ada pertukaran informasi antara anggota DPRD dengan konstituennya. Anggota DPRD di dalam kegiatan reses menyampaikan kinerjanya selama ini dan sekaligus menginformasikan tentang informasi pembangunan di Jawa Tengah. Hal ini juga bisa dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD di hadapan konstituen yang telah memilihnya. Di sisi lain konstituen yang menerima informasi tersebut juga berhak untuk menghampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD yang bersangkutan supaya dapat diperjuangkan oleh anggota DPRD itu.

Ardial (2010:44) menyebutkan tujuan komunikasi politik adakalanya sekedar penyampain informasi politik, pembentukan citra politik, pembentukan opini publik, dan bisa menghandel pendapat atau tuduhan lawan politik.

Selanjutnya komunikasi politik bertujuan menarik simpatik khalayak dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu atau pemilihan kepala daerah.

Lasswell dalam Varma (1995:28) memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas: *pertama*, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan *kedua*, bahwa komunikasi politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.

Dalam hal ini, R.S. Sigel dalam Sumarno (1989:10) memberikan pandangan bahwa sosialisasi politik bukan hanya menitikberatkan pada penerimaan norma-norma politik dan tingkah laku pada sistem politik yang sedang berlangsung, tapi juga bagaimana merwariskan atau mengalihkan nilai-nilai dari suatu generasi kenegaraan berikutnya.

1.5.6. Komunikator politik

Menurut Nimmo (2005:28), salah satu ciri komunikasi ialah bahwa orang jarang dapat menghindari dan keturutsertaan. Hanya dihadiri dan diperhitungkan oleh seorang lain pun memiliki nilai pesan. Dalam arti yang paling umum kita semua adalah komunikator, begitu pula siapa pun yang dalam *setting* politik adalah komunikator politik. Meskipun mengakui bahwa setiap orang boleh berkomunikasi tentang politik, kita mengakui bahwa relatif sedikit yang berbuat

demikian, setidak-tidaknya yang melakukannya serta tetap dan sinambung. Mereka yang relatif sedikit ini tidak hanya bertukar pesan politik; mereka adalah pemimpin dalam proses opini. Para komunikator politik ini, dibandingkan dengan warga negara pada umumnya, ditanggapi dengan lebih bersungguh-sungguh bila mereka berbicara dan berbuat.

Sebagai pendukung pengertian yang lebih besar terhadap peran komunikator politik dalam proses opini, Leonard W. Dood dalam Nimmo (2005:30) menyarankan jenis-jenis hal yang patut diketahui mengenai mereka. Komunikator dapat dianalisis sebagai dirinya sendiri. Sikapnya terhadap khalayak potensialnya, martabat yang diberikannya kepada mereka sebagai manusia, dapat mempengaruhi komunikasi yang dihasilkannya; jadi jika ia mengira mereka itu bodoh, ia akan menyesuaikan nada pesannya dengan tingkat yang sama rendahnya. Ia sendiri memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang dapat dikonseptualkan sesuai dengan kemampuan akalinya, pengalamannya sebagai komunikator dengan khalayak yang serupa atau yang tak serupa, dan peran yang dimainkan di dalam kepribadiannya oleh motif untuk berkomunikasi.

Berdasar pada anjuran Dood, jelas bahwa komunikator atau para komunikator harus diidentifikasi dan kedudukan mereka di dalam masyarakat harus ditetapkan. Untuk keperluan ini Nimmo (2005:30) mengidentifikasi tiga kategori politikus, yaitu yang bertindak sebagai komunikator politik, komunikator profesional dalam politik, dan aktivis atau komunikator paruh waktu (*part time*).

1.5.6.1. Politikus sebagai komunikator Politik

Politikus adalah orang yang bercita-cita untuk memegang jabatan pemerintah dan memegang pemerintah yang harus berkomunikasi tentang politik dan disebut dengan politikus, tak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau jabatan karier, baik jabatan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Pekerjaan mereka adalah aspek aspek utama dalam kegiatan ini. Daniel katz menunjukkan bahwa pemimpin politik mengarahkan pengaruhnya ke dua arah, yaitu mempengaruhi alokasi ganjaran dan mengubah struktur sosial yang ada atau mencegah perubahan demikian. (Nimmo, 2005:30).

Dalam kewenangannya yang pertama politikus itu berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok; pesan-pesan politikus itu mengajukan dan melindungi tujuan kepentingan politik, artinya komunikator politik mewakili kepentingan kelompoknya. Sebaliknya, politikus yang bertindak sebagai ideologi tidak begitu terpusat perhatiannya untuk mendesak tuntutan kelompoknya, ia lebih menyibukkan diri untuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi dan bahkan mendukung perubahan revolusioner.

Termasuk dalam kelompok ini, politikus yang tidak memegang jabatan dalam pemerintah, mereka juga komunikator politik mengenai masalah yang lingkungannya nasional dan internasional, masalah yang jangkauannya berganda dan sempit.

Jadi banyak jenis politikus yang bertindak sebagai komunikator politik, namun untuk mudahnya kita klasifikasikan mereka sebagai politikus (1) berada di

dalam atau di luar jabatan pemerintah, (2) berpandangan nasional atau sub nasional, dan (3) berurusan dengan masalah berganda atau masalah tunggal.

Sementara itu, Karl W. Deutsch dalam Nimmo (2005:243) mendefinisikan komunikasi politik sebagai transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dan sistem politik yang merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik, sehingga hasil yang dicapai dapat mempengaruhi pembahasan suatu kebijaksanaan yang ditujukan untuk kepentingan umum. Berkenaan dengan itu, Dan Nimmo mendefinisikan komunikasi politik sebagai kegiatan politik yang benar-benar mempertimbangkan dengan segala konsekuensi kebaikan yang mengatur tingkah laku manusia dalam keadaan yang bertentangan.

Lembaga legislatif atau parlemen sebagai lembaga politik formal dalam supra struktur politik memiliki fungsi komunikasi politik. Seperti yang dinyatakan oleh Bambang Cipto (1995:10) bahwa parlemen tidak harus diartikan sebagai badan pembuat undang-undang (*law-making body*) semata-mata tetapi juga sebagai media komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Selanjutnya, komunikasi politik juga memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam setiap sistem sosial.

Menurut A.W. Widjaja (1993:9-10) fungsi komunikasi politik dalam setiap sistem sosial meliputi beberapa hal berikut : (1) Informasi, (2) Sosialisasi, (3) Motivasi, (4) Perdebatan dan diskusi.

Informasi adanglah menyangkut pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta dan pesan opini dan komentar yang

dibutuhkan agar dapat dimengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat.

Sosialisasi (pemasyarakatan) merujuk penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.

Motivasi adalah menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar.

Perdebatan dan diskusi adalah kegiatan menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik.

Fungsi komunikasi politik mempunyai makna dan arti yang sangat penting dalam setiap proses politik dalam sebuah sistem politik baik itu oleh infra maupun supra struktur politik. Ardial (2010:39-40) menyatakan bahwa fungsi komunikasi politik itu adalah fungsi struktur politik menyerap berbagai aspirasi, pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkan sebagai bahan dalam penentuan kebijaksanaan. Selain itu, fungsi komunikasi politik juga merupakan fungsi penyebarluasan rencana-rencana atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kepada rakyat. Dengan demikian fungsi ini membawakan arus informasi timbal balik dari rakyat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada rakyat.

Di samping dapat memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijaksanaan, komunikasi politik juga berfungsi sebagai jalan mengalirnya informasi politik, sehingga secara lebih spesifik dapat mengetahui apa-apa yang menjadi aspirasi rakyat yang akan dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan yang dapat dirasakan oleh rakyat sebagai aspirasi mereka. Melalui kegiatan komunikasi politik yang dilandasi oleh kepentingan seluruh rakyat serta memberikan kelangsungan hidup dari lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) sekaligus berfungsinya lembaga tersebut yang bekerja dalam suatu sistem politik melalui informasi-informasi dari hasil komunikasi-komunikasi politik yang merupakan input bagi DPRD.

Terhadap arti pentingnya komunikasi politik antara kedua belah pihak tersebut lebih jauh dirasakan, terutama dalam hal keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan seluruh rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan pemerintahan, dimana sebagian besar di antara rakyat pengaruhnya adalah yang tidak langsung, yaitu melalui perwakilan. Oleh karena itu tuntutan dan harapan terhadap berperannya lembaga perwakilan rakyat sangat diperlukan oleh seluruh rakyat.

Suatu contoh konkrit dari hal di atas, dalam melaksanakan proses penetapan kebijaksanaan pemerintahan, umpamanya suatu keputusan tentang pemberian bantuan untuk pengangguran ke arah para warga dalam hal ini yang menganggur, sangat panjang atau melalui pelaksanaan kebijaksanaan oleh para wakil itu sendiri. Ketidaklangsungan hubungan antara warga dengan pemerintah adalah jarak yang merupakan bagian dari sistem politik. Apabila jarak ini tidak

dijembatani bersama, maka akan menjadi gangguan hubungan antara warga dan pemerintah. Jarak yang ada merupakan masalah politik, sehingga perlu diingat perbedaan-perbedaan pendapat politik antara pemerintah dan yang diperintah dan kepada tingkah laku yang kurang disesuaikan satu sama lain dari kedua golongan. (Hoogerwerf,1983:231).

Realisasi dari pengambilan kebijaksanaan yang berdasarkan kepentingan seluruh rakyat merupakan pencerminan dari keikutsertaan rakyat, sebagaimana yang diajarkan oleh teori demokrasi itu sendiri, dimana anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam proses dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan. (Sanit, 1985:203)

Dalam hal ini para wakil rakyatlah yang melakukan tindakan atau bertindak atas nama rakyat untuk merumuskan serta memutuskan kebijaksanaan tentang berbagai aspek kehidupan seluruh rakyat. Wakil rakyat harus mengetahui benar aspirasi rakyat tentang apa yang di inginkannya (rakyat). Untuk dapat mengetahui secara benar aspirasi atau keinginan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka para wakil rakyat harus mengadakan dan melaksanakan mekanisme komunikasi politik secara teratur.

1.5.7. Empati dan Homofili

Gaya Komunikasi politik akan sukses bila seorang politisi sukses memproyeksi dirinya ke dalam sudut pandang orang lain. Ini erat kaitannya dengan citra diri sang komunikator politik untuk menyesuaikan suasana pikirannya dengan alam pikiran khalayak. Begitupula dalam kegiatan reses yang akan sukses jika seorang

Pimpinan Dewan mampu memproyeksikan dirinya ke dalam sudut pandang konstituen yang hadir dalam kegiatan reses tersebut. Empati pimpinan dewan akan menunjang gaya komunikasinya di hadapan konstituen.

David Berlo (1997:172) mengembangkan konsep empati menjadi teori komunikasi. Empat tingkat ketergantungan komunikasi adalah; (1) peserta komunikasi memilih pasangan sesuai dirinya, (2) tanggapan yang diharapkan berupa umpan balik, (3) individu mempunyai kemampuan untuk menanggapi, mengantisipasi bagaimana merespon informasi, serta mengembangkan harapan-harapan tingkah laku partisipan komunikasi, dan (4) terjadi pergantian peran untuk mencapai kesamaan pengalaman dalam perilaku empati.

Berlo membagi teori empati menjadi dua : (1) Teori Penyimpulan (*inference theory*), orang dapat mengamati atau mengidentifikasi perilakunya sendiri, dan (2) Teori Pengambilan Peran (*role taking theory*), seseorang harus lebih dulu mengenal dan mengerti perilaku orang lain.

Lebih lanjut Berlo membagi tahapan proses empati : (1) Kelayakan (*decentering*), dalam tahap ini bagaimana individu memusatkan perhatian kepada orang lain dan mempertimbangkan apa yang dipikirkan dan dikatakan orang lain tersebut, (2) Pengambilan peran (*role taking*), mengidentifikasikan orang lain ke dalam dirinya, menyentuh kesadaran diri melalui orang lain. (3) Empati komunikasi (*empathic communication*).

Dalam tingkatan pengambilan peran terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan : (a) Tingkatan budaya (*cultural level*) yang mendasarkan pada asumsi sebagian kelompok budaya, (b) Tingkatan sosiologis (*sociological level*)

yang mendasarkan pada asumsi sebagian kelompok budaya, (c) Tingkatan psikologis (*psychological level*) mendasarkan pada apa yang dialami oleh individu.

Empati komunikasi (*empathic communication*), empati komunikasi meliputi penyampaian perasaan, kejadian, persepsi atau proses yang menyatakan tidak langsung perubahan sikap/perilaku penerima. Dalam melakukan empati, Rogers dan Shoemaker dalam Ardial (2010:151) memperkenalkan Homofili. Konsep ini diartikan sebagai kemampuan individu untuk menciptakan kebersamaan, baik fisik maupun mental. Dengan Homofili dapat tercipta hubungan-hubungan sosial dan komunikasi yang intensif dan efektif. Homofili berasal dari bahasa Yunani, *Homoios* yang mempunyai arti sama atau serupa. Secara etimologis, Homofili adalah afiliasi atau komunikasi dengan pribadi yang sama, atau yang memiliki atribut tertentu yang sama dan serupa. (Ardial, 2010 :151).

Untuk itulah dalam menunjang gaya komunikasi antara anggota DPRD dengan konstituennya berjalan dengan efektif, harus diperhatikan tiga dalil agar membentuk prinsip homofili (Nimmo, 2003:183) : (1) Orang-orang yang mirip satu sama lain lebih sering berkomunikasi, lebih sering berkomunikasi daripada orang-orang yang tidak mempunyai persamaan sifat dan pandangan, (2) Komunikasi akan berjalan efektif terjadi bila sumber dan penerima adalah homofilistik, karena orang-orang yang mirip cenderung menemukan makna yang sama dan diakui bersama dalam pesan-pesan yang diperlukan oleh mereka, (3) Homofili dan komunikasi saling memelihara karena makin banyak komunikasi

diantara mereka makin cenderung berbagi pandangan dan melanjutkan komunikasi.

Empati dan Homofili dapat menciptakan suasana yang akrab dan intim sehingga komunikasi politik dapat berjalan secara interaksional. Dalam hal ini, interaksi yang terjadi adalah antara dua subjek. Bukan antara subjek dengan objek yang selevel dan sederajat. Dalam komunikasi politik, dialog yang dikembangkan adalah bukan antara aku atau kamu, melainkan yang menonjol adalah kita.

Dalam komunikasi politik, proses dialogis akan berjalan secara horizontal dalam arti tidak ada politikus yang member dan menerima perintah melainkan para politikus itu berinteraksi atau bermusyawarah. Hal ini dimaksudkan antara politisi dan konstituennya memiliki pikiran, perasaan, penampilan, dan tindakan politik yang sama.

1.5.8. Gaya Komunikasi

Seperti yang disinggung di atas, dalam tradisi retorika, sangat mengutamakan gaya dalam prosesnya. Menurut Edward T. Hall (Mulyana, 2008:230-232), membagi gaya komunikasi menjadi dua, yaitu gaya komunikasi tingkat tinggi / *High Context Culture* (HCC) dan gaya komunikasi tingkat rendah / *Low Context Culture* (LCC). Gaya komunikasi tingkat tinggi mengandung pesan yang kebanyakan dalam konteks fisik, sehingga makna pesan hanya dapat dipahami dalam konteks pesan tersebut. Dalam konteks tinggi, makna terinternalisasikan pada orang yang bersangkutan, dan pesan non verbal lebih ditekankan.

Gaya komunikasi ini merupakan kekuatan kohesif bersama yang memiliki sejarah yang panjang, lamban berubah dan berfungsi untuk menyatukan kelompok, gemar berdiam diri, tidak suka berterus terang, dan terkesan misterius. Menekankan isyarat konstektual, suatu pertanyaan atau jawaban harus dimaknai sesuai konteksnya. Mengharapkan orang lain memahami suasana hati yang tak terucapkan. Menurut Hall dalam Mulyana (2008:146-147), gaya komunikasi konteks tinggi punya kecenderungan lebih besar untuk membedakan orang dalam dari orang luar daripada konteks rendah.

Sebaliknya, komunikasi konteks rendah cepat dan mudah berubah, karenanya tidak mengikat kelompok. Dalam gaya komunikasi ini, sibuk dengan spesifikasi, rincian, dan jadwal waktu yang persis dengan mengabaikan konteks. Bahasa yang digunakan langsung dan lugas. Dianggap berbicara berlebihan, mengulang-ulang apa yang sudah jelas.

Lebih lanjut T. Hall dalam Liliweri (2007:116-118) menjelaskan perbedaan antara Gaya Komunikasi tingkat tinggi dan tingkat rendah yang ditinjau dari beberapa unsur, diantaranya ; (1) Persepsi terhadap isu yang ada dan orang yang menyebarkan isu, (2) Persepsi pada relasi tugas, (3) Persepsi terhadap logis tidaknya informasi, (4) Persepsi terhadap Gaya Komunikasi, (5) Persepsi terhadap pola negosiasi, (6) Persepsi terhadap informasi mengenai individu.

Pertama, persepsi terhadap isu yang ada dan orang yang menyebarkan isu. Dalam hal ini HCC tidak memisahkan isu dari orang yang mengkomunikasikannya. Sehingga yang terjadi adalah kadang-kadang isu itu dianggap benar tergantung dari siapa yang mengatakannya. Bahkan terkadang

seseorang akan menolak orang yang memberikan isu sekaligus menolak informasi yang diberikan. Sedangkan pada LCC lebih memisahkan isu dari orang yang mengkomunikasikannya. Sehingga yang terjadi adalah kadang-kadang isu itu dianggap benar tergantung dari siapa yang mengatakannya. Dalam budaya LCC lebih mengutamakan isi informasi dan tidak mempersoalkan asal informasi.

Kedua, persepsi pada relasi tugas. Dalam budaya HCC mengutamakan relasi sosial dalam melaksanakan tugas karena berorientasi pada orientasi sosial dan pada hubungan personal (*personal relations*). Sedangkan dalam budaya LCC tidak mengutamakan relasi sosial yang ada berdasarkan relasi tugas (*task oriented*) dan pada hubungan impersonal (*impersonal relations*).

Ketiga, persepsi terhadap logis tidaknya informasi. Budaya HCC tidak menyukai sesuatu yang terlalu rasional namun cenderung mengutamakan emosi dalam mengakses informasi. Orang yang memiliki budaya HCC lebih menyukai basa basi dalam berkomunikasi. Sedangkan dalam budaya LCC, menyukai sesuatu yang rasional, cenderung mengutamakan logika dalam mengakses informasi. Mereka tidak menyukai basa basi dalam berkomunikasi.

Keempat, persepsi terhadap Gaya Komunikasi. Dalam budaya HCC selalu menggunakan gaya komunikasi tidak langsung, gaya komunikasi yang kurang formal dan mengutamakan dengan pesan nonverbal. Sebaliknya, dalam budaya LCC selalu menggunakan gaya komunikasi langsung, gaya komunikasi yang formal dan mengutamakan dengan pesan verbal.

Kelima, persepsi terhadap pola negosiasi. Anggota masyarakat dalam budaya HCC mengutamakan perundingan yang mengutamakan faktor-faktor

relasi antar manusia dengan mengutamakan perasaan dan intuisi serta mengutamakan hati. Sedangkan anggota masyarakat dalam budaya LCC mengutamakan perundingan melalui bargaining, yang mengutamakan faktor-faktor otak daripada hati. Pilihan komunikasi meliputi pertimbangan rasional.

Keenam, persepsi terhadap informasi mengenai individu. Budaya HCC mengutamakan kehadiran individu dengan dukungan faktor sosial, mereka tidak memedulikan siapa dia, pekerjaan apa, benar salah, ahli atau tidak. Budaya HCC ini lebih mendengarkan loyalitas kelompoknya. Sedangkan budaya LCC mengutamakan kapasitas individu tanpa memperhatikan faktor sosial, mereka mengutamakan informasi seorang individu, aspek-aspek individu harus lengkap dan mereka tidak mengutamakan pertimbangan latar belakang keanggotaan individu.

Selain itu dalam pola HCC terdapat juga ciri lain seperti ; bentuk pesannya sebagian besar merupakan pesan-pesan implisit yang tersembunyi, dalam melakukan reaksi terhadap sesuatu tidak selalu tampak, dalam memandang ingroup (yang ada dalam kelompoknya) dan *outgroupnya* (yang berada diluar kelompoknya) selalu luwes dalam melihat perbedaan, pertalian antar pribadinya sangat kuat, serta konsep terhadap waktunya sangat terbuka dan luwes.

Sedangkan dalam LCC juga mengandung ciri-ciri lain yaitu; bentuk pesannya sebagian besar jelas dan merupakan pesan-pesan eksplisit, dalam melakukan reaksi terhadap sesuatu selalu tampak. Selalu memisahkan kepentingan *ingroup* (yang ada dalam kelompoknya) dan *outgroupnya* (yang

berada diluar kelompoknya), pertalian antar pribadinya sangat lemah, konsep terhadap waktunya sangat terorganisir.

Berikut tabel perbedaan antara budaya konteks rendah dengan budaya konteks tinggi.

Tabel 1.1
Perbedaan Ciri-Ciri HCC dan LCC

Unsur / Persepsi	HCC	LCC
Isu yang ada dan orang yang menyebarkan isu	Tidak memisahkan. isu itu tidak dianggap benar. Bahkan terkadang seseorang akan menolak orang yang memberikan isu sekaligus menolak informasi yang diberikan.	Memisahkan. isu itu dianggap benar tergantung dari siapa yang mengatakannya. Dalam budaya LCC lebih mengutamakan isi informasi dan tidak mempersoalkan asal informasi.
relasi tugas	Mengutamakan relasi sosial dalam melaksanakan tugas karena berorientasi pada orientasi sosial dan pada hubungan personal (<i>personal relations</i>).	Mengutamakan relasi sosial yang ada berdasarkan relasi tugas (<i>task oriented</i>) dan pada hubungan impersonal (<i>impersonal relations</i>)
Logis tidaknya informasi	Tidak menyukai sesuatu yang terlalu rasional, cenderung mengutamakan emosi dalam mengakses informasi. Mereka lebih menyukai basa basi.	Meyukai sesuatu yang rasional, tidak menyukai basa basi.
Gaya Komunikasi	Menggunakan gaya komunikasi tidak langsung, kurang formal dan mengutamakan dengan pesan nonverbal	Menggunakan gaya komunikasi langsung, formal dan mengutamakan dengan pesan verbal
Pola negosiasi	Mengutamakan perundingan yang mengutamakan faktor-faktor relasi antar manusia dengan mengutamakan perasaan dan intuisi serta mengutamakan hati.	Mengutamakan perundingan melalui bargaining yang mengutamakan faktor-faktor otak daripada hati. Pilihan komunikasi meliputi pertimbangan rasional.

Informasi mengenai individu.	mengutamakan kehadiran individu dengan dukungan faktor sosial, mereka tidak mempedulikan siapa dia, pekerjaan apa, benar salah, ahli atau tidak. Budaya HCC ini lebih mendengarkan loyalitas kelompoknya.	mengutamakan kapasitas individu tanpa memperhatikan faktor sosial, mereka mengutamakan informasi seorang individu, aspek-aspek individu harus lengkap dan mereka tidak mengutamakan pertimbangan latar belakang keanggotaan individu.
Pesan	sebagian besar merupakan pesan-pesan implisit yang tersembunyi	sebagian besar jelas dan merupakan pesan-pesan eksplisit
Reaksi terhadap sesuatu	Tidak selalu tampak	selalu tampak.
Cara pandang ingroup dan outgroupnya	selalu luwes dalam melihat perbedaan	Selalu memisahkan kepentingan
Pertalian antar pribadi	sangat kuat	lemah
Konsep terhadap waktu	terbuka dan luwes	sangat terorganisir

Sedangkan Sasa Djuarsa (2003:136) membagi gaya komunikasi menjadi enam jenis gaya, yaitu : (1) Gaya Komunikasi Mengendalikan (*The controlling style*), (2) Gaya Komunikasi Dua Arah (*The equalitarian style*), (3) Gaya Komunikasi Penarikan Diri (*The Withdrawal style*), (4) Gaya Komunikasi Berstruktur (*The structuring style*), (5) Gaya Komunikasi Dinamis (*The dynamic style*), (6) Gaya Komunikasi Melepaskan (*The relinquishing style*).

Gaya Komunikasi Mengendalikan (*The controlling style*), gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan, ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau *one-way communications*.

Pihak-pihak yang memakai *controlling style of communication* ini, lebih memusatkan perhatian kepada pengiriman pesan. Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian untuk berbagi pesan. Mereka juga tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian pada umpan balik, kecuali jika umpan balik atau *feedback* tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Para komunikator satu arah tersebut tidak khawatir dengan pandangan negatif orang lain, tetapi justru berusaha menggunakan kewenangan dan kekuasaan untuk memaksa orang lain mematuhi pandangan-pandangannya.

Pesan-pesan yang berasal dari komunikator satu arah ini, tidak berusaha 'menjual' gagasan agar dibicarakan bersama namun lebih pada usaha menjelaskan kepada orang lain apa yang dilakukannya. *The controlling style of communication* ini sering dipakai untuk mempersuasi orang lain supaya bekerja dan bertindak secara efektif, dan pada umumnya dalam bentuk kritik. Namun demikian, gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, tidak jarang bernada negatif sehingga menyebabkan orang lain memberi respons atau tanggapan yang negatif pula.

Gaya Komunikasi Dua Arah (*The equalitarian style*), aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan. *The equalitarian style of communication* ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah (*two-way traffic of communication*).

Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun

pendapat dalam suasana yang rileks, santai dan informal. Dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama.

Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi yang bermakna kesamaan ini, adalah orang-orang yang memiliki sikap kepedulian yang tinggi serta kemampuan membina hubungan yang baik dengan orang lain baik dalam konteks pribadi maupun dalam lingkup hubungan kerja. *The equalitarian style* ini akan memudahkan tindak komunikasi dalam organisasi, sebab gaya ini efektif dalam memelihara empati dan kerja sama, khususnya dalam situasi untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan yang kompleks. Gaya komunikasi ini pula yang menjamin berlangsungnya tindak berbagi informasi di antara para anggota dalam suatu organisasi.

Gaya Komunikasi Berstruktur (*The structuring style*). gaya komunikasi yang berstruktur ini, memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Pengirim pesan (*sender*) lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut.

Gaya Komunikasi Dinamis (*The dynamic style*), gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif, karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan (*action-oriented*). *The dynamic style of communication* ini sering dipakai oleh para juru

kampanye ataupun supervisor yang membawa para wiraniaga (*salesmen atau saleswomen*).

Tujuan utama gaya komunikasi yang agresif ini adalah mestimulasi atau merangsang pekerja/karyawan untuk bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik. Gaya komunikasi ini cukup efektif digunakan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat kritis, namun dengan persyaratan bahwa karyawan atau bawahan mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah yang kritis tersebut.

Gaya Komunikasi Melepaskan (*The relinquishing style*), gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat ataupun gagasan orang lain, daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan (*sender*) mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain.

Pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan efektif ketika pengirim pesan atau sender sedang bekerja sama dengan orang-orang yang berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti serta bersedia untuk bertanggung jawab atas semua tugas atau pekerjaan yang dibebarkannya.

Gaya Komunikasi Penarikan Diri (*The withdrawal style*), Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindakan komunikasi, artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antarpribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut.

Tabel 1.2
Enam Gaya Komunikasi

Gaya	Komunikator	Maksud	Tujuan
Controlling style	Memberi perintah, butuh perhatian orang lain	Mempersuasi orang Lain	Menggunakan kekuasaan dan wewenang
Equalitarian style	Akrab, hangat	Menstimulasi orang Lain	Menekankan pengertian bersama
Structuring style	Objektif, tidak memihak	Mensistemasi lingkungan kerja, memantapkan struktur	Menegaskan ukuran, prosedur, aturan yang dipakai
Dynamic style	Mengendalikan, agresif	Menumbuhkan sikap untuk bertindak	Ringkas dan singkat.
Relinquishing style	Bersedia menerima gagasan orang lain	Mengalihkan tanggungjawab kepada orang lain	Mendukung pandangan orang lain
Withdrawal style	Independen/berdiri sendiri	Menghindari komunikasi	Mengalihkan persoalan

Dari kedua teori di atas baik teori Konteks Tinggi dan Konteks Rendah bisa di gabungkan dengan Enam Teori Gaya Komunikasi dari Sasa Djuarsa dimana dalam gaya komunikasi tingkat tinggi lebih dominan aspek non verbalnya. Sedangkan dalam konteks rendah lebih dominan aspek verbalnya.

Berikut tabel penggabungan kedua teori di atas dan faktor dominannya :

Tabel 1.3
Penggabungan Dua Teori Gaya Komunikasi

GAYA KOMUNIKASI		ASPEK KOMUNIKASI	
T. HALL	SASA DJUARSA	VERBAL	NON VERBAL
High Context	Equalitarian style	Kurang Dominan	Lebih Dominan
	Structuring style		
	Relinquishing style		
Low Context	Controlling style	Lebih Dominan	Kurang Dominan
	Dynamic style		
	Withdrawal style		

Gambaran umum yang diperoleh dari uraian di atas adalah bahwa *the equalitarian style of communication* merupakan gaya komunikasi yang ideal digunakan anggota DPRD pada saat reses. Sementara tiga gaya komunikasi lainnya: *structuring*, *dynamic* dan *relinquishing* dapat digunakan secara strategis untuk menghasilkan efek yang bermanfaat bagi anggota dewan yang bersangkutan. Dan dua gaya komunikasi terakhir: *controlling* dan *withdrawal* mempunyai kecenderungan menghalangi berlangsungnya interaksi komunikasi yang bermanfaat dan produktif.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Komunikasi

Proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu) mereka bertindak dan untuk bertukar citra itu melalui simbol.

Politik

Kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain- jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya dimana perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan perpecahan untuk selesaikan.

Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis

kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik

Gaya

Adalah bahasa yang digunakan baik verbal maupun non verbal untuk menyampaikan ide dalam cara tertentu

1.6.1. Gaya Komunikasi Politik

Adalah seperangkat perilaku politik antar pribadi yang terspesialisasi dan digunakan dalam suatu situasi politik tertentu baik berupa verbal maupun non verbal.

Komunikasi Verbal mencakup aspek-aspek berupa ;

- a. *Vocabulary* (perbendaharaan kata-kata). Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti, karena itu olah kata menjadi penting dalam berkomunikasi.
- b. *Racing* (kecepatan). Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat.
- c. Intonasi suara: akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proposional merupakan hambatan dalam berkomunikasi.
- d. Humor. Merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi untuk memecah kekauan dalam berkomunikasi

- e. Singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah dimengerti.
- f. *Timing* (waktu yang tepat) adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi, artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan.

Komunikasi Nonverbal

- a. Komunikasi objek. Yang paling umum adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya, walaupun ini dianggap termasuk salah satu bentuk stereotipe.
- b. Sentuhan. Sentuhan dapat termasuk: bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-elus, pukulan, dan lain-lain. Masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Sentuhan juga dapat menyebabkan suatu perasaan pada sang penerima sentuhan, baik positif ataupun negatif.
- c. Kronemik. Kronemik adalah penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas, banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta ketepatan waktu

- d. Bahasa Tubuh. Meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frase.
- e. Proxemik atau bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa jauh atau seberapa dekat tingkat keakraban Anda dengan orang lain, menunjukkan seberapa besar penghargaan, suka atau tidak suka dan perhatian Anda terhadap orang lain, selain itu juga menunjukkan simbol sosial.
- f. Vokalik adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Contohnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Selain itu, penggunaan suara-suara pengisi seperti "mm", "e", "o", "um", saat berbicara juga tergolong unsur vokalik, dan dalam komunikasi yang baik hal-hal seperti ini harus dihindari.
- g. Lingkungan dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Diantaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna
- h. Variasi budaya dalam komunikasi nonverbal. Budaya asal seseorang amat menentukan bagaimana orang tersebut berkomunikasi secara nonverbal. Perbedaan ini dapat meliputi perbedaan budaya Barat-Timur, budaya konteks tinggi dan konteks rendah, bahasa, dsb.

1.6.2. Faktor yang menghambat Komunikasi Politik

a. Hambatan dari pengirim pesan :

Pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan, hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional.

b. Hambatan dalam penyandian/symbol :

Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu, symbol yang dipergunakan antara si pengirim dan penerima tidak sama atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit.

c. Hambatan media :

Adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya gangguan suara radio dan aliran listrik sehingga tidak dapat mendengarkan pesan.

d. Hambatan dalam bahasa sandi :

Hambatan terjadi dalam menafsirkan sandi/ bahasa tubuh/isyarat yang dilakukan komunikator oleh si penerima

e. Hambatan dari penerima pesan :

Misalnya kurangnya perhatian pada saat menerima /mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggapan yang keliru dan tidak mencari informasi lebih lanjut.

f. Hambatan dalam memberikan umpan balik :

Umpan balik yang diberikan tidak menggambarkan apa adanya akan tetapi memberikan interpretatif, tidak tepat waktu atau tidak jelas dan sebagainya.

Tabel 1.4
Operasionalisasi Konsep

GAYA KOMUNIKASI		ASPEK KOMUNIKASI	
T. HALL	SASA DJUARSA	VERBAL	NON VERBAL
High Contact	Equalitarian style	Kurang Dominan	Komunikasi objek. Sentuhan. Kronemik Bahasa Tubuh Proxemik (bahasa ruang) Vokalik Lingkungan Variasi budaya
	Structuring style		
	Relinquishing style		
Low Contact	Controlling style	Vocabulary Racing (kecepatan) Intonasi suara Humor Singkat dan jelas Timing (waktu yang tepat)	Kurang Dominan
	Dynamic style		
	Withdrawal style		
Faktor Penghambat	Hambatan dari pengirim pesan Hambatan dalam penyandian/symbol Hambatan dari Faktor Pendukung Hambatan media Hambatan dalam bahasa sandi Hambatan dari penerima pesan Hambatan dalam memberikan umpan balik		

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian ini bertipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif: yang tertulis dan diucapkan orang dan perilaku-perilaku yang dapat diamati. (Pawito, 2007:84).

Adapun beberapa ciri yang menyertai metode penelitian kualitatif antara lain; (1) *human instrument*, (2) bersifat deskriptif, (3) lebih memperhatikan proses dari pada hasil, (4) Analisis secara induktif, (5) desain bersifat sementara.

Human interest artinya, peneliti menjadi instrument utamanya. Ini meliputi tidak saja dalam pengumpulan data, tetapi juga analisisnya. (Sutopo, 2002:35-36). Sebagaimana diungkapkan Lincoln dan Guba, walaupun diakui manusia bersifat subjektif, tetapi manusia sebagai instrumen utama dapat menghasilkan data yang reliabilitasnya hampir sama dengan data yang dihasilkan oleh instrumen yang dibuat secara objektif.

Bahkan menurut Hasan (1990) mengungkapkan keuntungan penggunaan manusia sebagai instrumen penelitian kualitatif karena manusia itu; (a) responsif, artinya manusia dapat merasa dan “*multi purpose*” dan mengumpulkan informasi “*multi-factors*” secara serempak, (b) adaptif, yakni manusia bersifat fleksibel sehingga dapat berfungsi Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai gaya komunikasi politik yang terjadi sebagai pertanggungjawaban kepada konstituen dan faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan komunikasi politik tersebut, (c) “*holistic emphasize*”, artinya hanya manusialah “alat” yang dapat memahami keseluruhan konteks, (d) memungkinkan perluasan pengetahuan secara langsung, (e) memungkinkan pemrosesan data segera sehingga dapat mengemukakan hipotesis di lapangan, (f) kesempatan untuk melakukan klasifikasi dan peringkasan data sewaktu masih di lapangan, (g) kesempatan untuk mencari respons yang atipikal. (Ibrahim, 2004:171).

Maka, dalam penelitian kualitatif “*the research is the key instrument*” (peneliti adalah alat kunci). Lincoln dan Guba (1985) secara eksplisit menjelaskan, “*the instrument of choice in naturalistic inquiry is the human*” (alat yang dipilih dalam pemeriksaan *naturalistic* adalah manusia).

Sementara itu, Nasution dalam Sugiyono (2005:60-61) juga pernah mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk pasti.

Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan serba tidak pasti dan tidak jelas itu tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Kedua, bersifat deskriptif. Data yang akan dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk deskripsi fenomena, tidak berupa angka-angka atau koefisien tentang hubungan antar variabel. Tulisan hasil penelitian dalam penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari kumpulan data untuk memberikan ilustrasi dan mengisi materi laporan. Peneliti berusaha menganalisis data dengan seluruh kekayaan informasi sebagaimana terekam dalam kumpulan data. Dalam hal ini, narasi tertulis menjadi sangat penting, baik dalam perekaman data maupun saat penulisan hasil penelitian. Ini mengingatkan, menurut Bogdan dan Biklen bahwa setiap gejala adalah potensial sebagai kunci pembuka bagi pemahaman tentang apa yang sedang dipelajari.

Ketiga, lebih memperhatikan proses dari pada hasil. Penelitian dilakukan dengan melihat konteks permasalahan secara utuh, dengan fokus penelitian pada 'proses' dan bukan pada 'hasil'. Dimana peneliti lebih memperhatikan bagaimana orang bertukar gagasan untuk memperoleh pengertian yang sama tentang sesuatu daripada apa kesamaan pengertian itu; peneliti lebih memperhatikan bagaimana suatu *notion* berkembang menjadi *common sense*.

Keempat, Analisis secara induktif. Dalam hal ini, peneliti tidak mencari data untuk memperkuat atau menolak hipotesis yang telah diajukan sebelum memulai penelitian, tetapi untuk melakukan abstraksi setelah rekaman fenomena khusus dikelompokkan menjadi satu. Teori yang dikembangkan dengan cara ini muncul dari bawah, berasal dari sejumlah besar satuan bukti yang terkumpul yang saling berhubungan satu dengan lainnya.

Kelima, desain bersifat sementara. Artinya, desain yang digunakan bersifat lentur dan dapat berkembang terus selama pengumpulan di lapangan. Atau meminjam istilahnya H.B. Sutopo (2002:61), desain penelitian kualitatif itu bersifat lentur dan terbuka sehingga dapat dimaknai disini bahwa penelitian kualitatif cenderung menggunakan pola penelitian siklus. Dimana dengan pola ini peneliti memiliki kebebasan untuk mengulang kegiatan kegiatan yang sudah dilakukan guna mendapat kemantapan atau mengubah hal-hal yang tidak tepat untuk disesuaikan dengan kenyataan konteksnya.

Keenam, hasil penelitian tidak bisa diramalkan atau dipastikan sebelumnya. Sebab, akan banyak hal-hal yang terungkap yang tidak terduga

sebelumnya sebagai hal- hal baru. Oleh karena itu, dalam penelitian ini selalu terbuka kemungkinan penemuan atau *discovery*.

Tipe penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian pada suatu saat tertentu. (Widodo, 1998:15). Penelitian ini akan mencoba menjabarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan komunikasi politik Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan kegiatan reses pada masa sidang I, II, dan III tahun 2010 di daerah pemilihannya masing-masing.

1.7.2. Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014 yang melakukan kegiatan reses di Daerah pemilihan yang berbeda-beda di Jawa Tengah.

1.7.3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti memilih subjek penelitian yaitu Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan daerah pemilihan dengan berbagai kriteria, diantaranya : (1) Pimpinan Dewan adalah individu-individu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas lebih diantara anggota dewan lainnya, (2) Setiap pimpinan dewan berasal dari lima partai besar yang memperoleh suara terbesar dalam pemilu legislatif tahun 2009, (3) Setiap pimpinan dewan adalah sebagai koordinator/ membawahi komisi-komisi yang berbeda di DPRD Jawa Tengah, (4)

Semua pimpinan DPRD terlibat di dalam kegiatan reses, sehingga peneliti mengambil secara sengaja dari setiap daerah pemilihan.

Berikut Tabel Kelima Pimpinan Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah :

Tabel 1.5
Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah 2009-2014

No.	Nama	Jabatan	Partai	Koordinator
1.	H. Murdoko, SH	Ketua DPRD	PDI Perjuangan	Semua Komisi
2.	H. Bambang Priyoko, S.Ip	Wakil Ketua I	Partai Demokrat	Komisi B
3.	Dr. H. Bambang Sadono,SH, MH	Wakil Ketua II	Partai Golkar	Komisi E
4.	Drs. Abdul Fikri Fakhri, MM	Wakil Ketua III	PKS	Komisi A
5.	M. Reza Kurniawan	Wakil Ketua IV	PAN	Komisi C,D

1.7.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Dimana data primer adalah secara langsung diambil dari objek / obyek penelitian oleh peneliti yang berupa wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data dari surat kabar atau internet.

1.7.5. Sumber Data

Sedangkan sumber data atau informan berkaitan dengan pembatasan jumlah dan jenis dari sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Dengan demikian teknik cuplikan (*sampling*) dalam penelitian ini bersifat bertujuan dimana pengambilannya didasarkan atas berbagai pertimbangan tertentu maka dikenal sebagai *purposive sampling*. Dimana pilihan Informan diarahkan pada sumber

data yang dipandang memiliki data penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bogdan & Biklen (1982) menyebut, teknik ini dalam penelitian kualitatif sering juga dinyatakan sebagai *internal sampling* karena sama sekali bukan dimaksudkan untuk mengusahakan generalisasi pada populasi, tetapi untuk memperoleh kedalaman studi di dalam suatu konteks tertentu.(Sutopo, 2002:36-37).

Dengan *purposive sampling* peneliti mencari dan memilih data utama yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Goetz dan LeCompte (1984) menyebut teknik ini sebagai *criterion based selection* karena cuplikan dalam penelitian kualitatif yang diambil lebih bersifat selektif. Pemilihan data dalam penelitian ini tentu saja bersifat purposif sesuai dengan daya jangkauan dan kekuatan peneliti melakukan pelacakan berupa "bibliografi kerja" atau usaha sistematis di perpustakaan untuk mengumpulkan sumber-sumber bahan. (Sutopo, 2002:56).

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, lebih mendasarkan pada alasan atau pertimbangan-pertimbangan tertentu (*purposeful selection*) sesuai dengan tujuan penelitian.(Sutopo, 2002:88).

Maka peneliti menentukan informan dengan memilih *stake holders* Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terlibat pada saat kegiatan Reses yang dilakukan oleh kelima Pimpinan Dewan tersebut. Pemilihan ini dengan kriteria antara lain memiliki pemahaman yang lebih berkenaan dengan materi yang disampaikan Pimpinan Dewan pada saat reses.

Peneliti dengan sengaja memilih informan tersebut yang berasal dari tiga golongan. Pertama dari internal partai, dari staf pribadi, dan dari wartawan yang dipandang sebagai sumber eksternal. Informan tersebut diantaranya : (1) Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah, serta jajaran Eksekutif Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa, (2) Pimpinan/Pengurus Partai Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan Desa/Kelurahan Partai, (3) Pimpinan/Anggota Fraksi Partai DPRD Kabupaten/Kota, (4) Tokoh masyarakat, (5) Staf pribadi/staf ahli pimpinan dewan, dan staf Fraksi Partai Pimpinan dewan, (6) Wartawan yang sering meliput kegiatan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah

Berikut Tabel Informan dalam penelitian ini.

Tabel 1.6
Data Informan

PIMPINAN DEWAN	NAMA INFORMAN	JABATAN
H. Murdoko		
	Wirandiyo	Staf Pribadi, PNS Sekwan DPRD Prov. Jateng
	Abang Baginda	Kepala Kesekretariatan DPD PDIP Jateng
	Joko Suranto	Ketua Ranting PDI Perjuangan Bulu Lor, Kota Semarang
H. Bambang Priyoko		
	Agung Yudiarto, SH	Staf Pribadi, PNS Sekwan DPRD Prov. Jateng
	Suntoro	Kepala Staf Fraksi Partai Demokrat DPRD Prov. Jateng
	Abu Nafie	Wakil Bupati Blora, diusung oleh Partai Demokrat Kab. Blora
H. Bambang Sadono		
	Maryudi, SH, MM	Staf Pribadi, PNS Sekwan DPRD Prov. Jateng
	Mustofa, SH	Ketua Partai Golkar Kec. Kedungjati Kabupaten Grobogan
	Imam Supardi	Konstituen, Tunjungan, Blora
	Anwar Cholil	Anggota DPRD Kabupaten Rembang

	HA. Djoemali	Anggota DPRD Prov. Jateng
	Nanang	Konstituen, Sulang Rembang
H. Abdul Fikri Faqih		
	Suharyanto	Staf Pribadi, PNS Sekwan DPRD Prov. Jateng
	Anton Purwiyanto, ST	Staf Fraksi PKS DPRD Prov. Jateng
	Rahmat Mujiono	Ketua DPD PKS Kota Tegal
Riza Kurniawan		
	Cahyo W. Prabowo, S.Sos	Staf Pribadi, PNS Sekwan DPRD Prov. Jateng
	Frangky Wisangono	Staf Fraksi PAN DPRD Prov. Jateng
Wartawan		
	Ibnu Syahri	TVRI Jawa Tengah
	Hariyoso	Harian Jakarta Pos

1.7.6. *Goodness of Criteria*

Kualitas data dalam penelitian dengan paradigma Post Positivistik dapat diperiksa melalui empat teknik, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi data, dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi. (Moleong, 2004 :175-178). Dalam penelitian ini, Informasi dalam penelitian kualitatif merupakan data penelitian yang kemudian divalidasi oleh peneliti dengan teknik triangulasi. (Pawito, 2007:89).

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal.

Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi data. Menurut Patton, triangulasi data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. (Moleong, 2002: 178).

Triangulasi data dari penelitian ini diperoleh dengan meng-cross check informasi antara informan yang satu dengan informan yang lain. Dengan kata lain, peneliti berupaya untuk mengakses sumber-sumber yang lebih bervariasi guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan yang sama. Peneliti berupaya menguji data yang diperoleh dari satu sumber (untuk dibandingkan) dengan data dari sumber yang lain. Dari sini, peneliti akan sampai pada satu kemungkinan : data yang diperoleh ternyata konsisten, tidak konsisten, atau berlawanan. Dengan cara ini peneliti kemudian dapat mengungkapkan gambaran yang lebih memadai (beragam perspektif) mengenai gejala yang diteliti. (Pawito, 2007-99).

Triangulasi dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul. Bagaimana pun, pemahaman yang mendalam (*deep understanding*) atas fenomena yang diteliti merupakan nilai yang harus diperjuangkan oleh setiap peneliti kualitatif. Sebab, penelitian kualitatif lahir untuk menangkap arti (*meaning*) atau memahami gejala, peristiwa, fakta, kejadian, realitas atau masalah tertentu

mengenai peristiwa sosial dan kemanusiaan dengan kompleksitasnya secara mendalam, dan bukan untuk menjelaskan (*to explain*) hubungan antar-variabel atau membuktikan hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah tertentu.

Kedalaman pemahaman akan diperoleh hanya jika data cukup kaya, dan berbagai perspektif digunakan untuk memotret sesuatu fokus masalah secara komprehensif. Karena itu, memahami dan menjelaskan jelas merupakan dua wilayah yang jauh berbeda.

1.7.7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya berupa informasi kategori substantif yang sulit dinumerisasikan. Secara garis besar data dalam penelitian komunikasi kualitatif dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis : menggunakan tehnik wawancara, observasi, dan sumber nonmanusia. (Pawito, 2007:96)

Wawancara dilakukan secara mendalam (*Indepth Interview*) yang bertujuan untuk mencari lebih dalam apa yang terkandung dalam hati dan pikiran informan. Wawancara melibatkan manusia sebagai subjek sehubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk diteliti. Terdapat tiga jenis teknik wawancara : (a) wawancara percakapan informal, (b) wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, (c) wawancara dengan menggunakan *open ended standart*. (Pawito, 2007:132).

Namun dalam penelitian ini akan menggunakan metode wawancara informal dan wawancara menggunakan pedoman. Wawancara informal cenderung pada sifat sangat terbuka dan sangat longgar sehingga wawancara mirip dengan percakapan. Dengan wawancara mendalam bisa digali apa yang tersembunyi baik yang menyangkut masa lampau, masa kini, masa depan sehingga suatu fenomena sosial bisa dijelaskan dan dipahami yaitu bagaimana gaya komunikasi politik anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap konstituen di daerah pemilihannya. Wawancara dilakukan tidak berstruktur berdasarkan pada suatu pedoman atau catatan yang hanya berisi butir-butir pemikiran mengenai hal yang akan ditanyakan pada waktu wawancara berlangsung.

Observasi biasanya dilakukan untuk melacak secara sistematis dan langsung gejala-gejala komunikasi yang ada di masyarakat. (Pawito, 2007:111) Observasi dilakukan dalam Penelitian ini menghubungkan data yang didapatkan pada saat wawancara dengan kegiatan yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah di daerah pemilihannya.

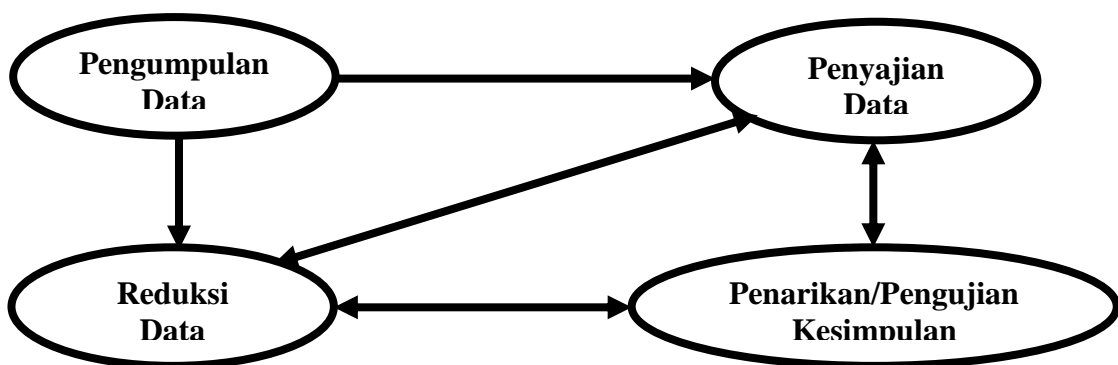
Sumber Nonmanusia berupa *Dokumen primer* berupa laporan tertulis atas pelaksanaan tugas yang disampaikan anggota DPRD kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Sedangkan *dokumen sekunder* yang dibutuhkan berupa notulen rapat, catatan khusus pada saat melakukan komunikasi politik oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah di daerah pemilihannya, serta peraturan tata tertib anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan dokumen lainnya yang terkait dengan masalah penelitian.

Data-data yang akan dianalisis nantinya adalah data-data yang didapatkan dari proses wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti. Data yang telah didapatkan melalui dokumentasi dan wawancara akan disusun secara sistematis atau diklasifikasikan secara khusus, kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberi gambaran secara mendalam tentang kenyataan sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Analisis data dalam penelitian komunikasi kualitatif pada dasarnya dikembangkan dengan maksud hendak memberikan makna terhadap data, menafsirkan, atau mentransformasikan data ke dalam bentuk-bentuk narasi yang kemudian mengarah pada temuan yang bernuansakan proposisi-proposisi ilmiah yang akhirnya sampai pada kesimpulan final. (Pawito, 2007:101).

1.7.8 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Interaktif Model Miles dan Huberman. (Pawito, 2007:104) Teknik analisis ini terdiri dari empat komponen : Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan.



Gambar 1.1
Analisis Interaktif Model dari Miles dan Huberman

1.7.8 .1. Pengumpulan Data.

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci.

1.7.8 .2. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

Dalam reduksi data, langkah-langkah analisis data yaitu: (a) Mengorganisir data, (b) Membaca keseluruhan informasi dan memberi kode, (c) Open coding, peneliti membentuk kategori informasi tentang peristiwa dipelajari, (d) Axial coding, peneliti mengidentifikasi suatu peristiwa, menyelidiki kondisi-kondisi yang menyebabkannya, mengidentifikasi setiap kondisi-kondisi, dan menggambarkan peristiwa tersebut, (f) Selective coding, peneliti mengidentifikasi suatu jalan cerita dan mengintegrasikan kategori di dalam model axial coding, (g) Selanjutnya peneliti boleh mengembangkan dan menggambarkan suatu acuan yang menerangkan keadaan sosial, sejarah, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi peristiwa.

1.7.8. 3. Penyajian Data

Setelah reduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Karena dalam penelitian kualitatif, data biasanya beraneka ragam persepektif dan terasa bertumpuk maka penyajian data pada umumnya diyakini sangat membantu proses analisis.

Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh.

Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

1.7.8 .4. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotetsis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari katagori-katagori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu

menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*.

Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa akan selalu terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti. Ketiga komponen berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar. Dan ternyata kesimpulannya tidak memadai, maka perlu diadakan pengujian ulang, yaitu dengan cara mencari beberapa data lagi di lapangan, dicoba untuk diinterpretasikan dengan fokus yang lebih terarah. Dengan begitu, analisis data tersebut merupakan proses interaksi antara ke tiga komponen analisis dengan pengumpulan data, dan merupakan suatu proses siklus sampai dengan aktivitas penelitian selesai. Peneliti dalam kaitan ini masih harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan yangtelah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti.

Kesimpulan yang dihasilkan pada umumnya tidak dimaksudkan sebagai generalisasi, tetapi sebagai gambaran interpretatif tentang realitas atau gejala yang diteliti secara holistik dalam setting tertentu. (Pawito, 2007:102). Kenyataan sosial yang akan dihasilkan dari penelitian ini berupa fakta yang menggambarkan gaya komunikasi politik anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dapat memberikan penjelasan mengenai hal ini kepada masyarakat.

1.7.9. Keterbatasan Penelitian

Peneliti sangat menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari kesempurnaan sebagaimana diharapkan. Secara teoritis, Teori Paradigma Naratif dari Fisher memiliki berbagai kelemahan diantaranya ; Paradigma Naratif itu terlalu luas karena menurut Fisher, semua komunikasi adalah naratif, (2) terdapat bias konservatif, karena berfokus pada nilai-nilai yang sudah ada dan gagal untuk mendeskripsikan cara-cara dimana sebuah cerita dapat mempromosikan perubahan sosial, (3) terlalu berlebihan dalam menempatkan dominasi publik oleh kaum elite sehingga tidak ada hal apapun yang tertanam di dalam penceritaan kisah yang menjamin bahwa kaum elite tidak akan mengontrol masyarakat.

Penelitian ini dimulai setelah kegiatan reses tahun 2010 telah selesai dilaksanakan, sehingga para informan memiliki keterbatasan ingatan yang mendetail tentang informasi penelitian. Kelemahan selanjutnya adalah terletak pada teknik pengambilan sampel penelitian. Karena menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, maka data yang dihasilkan tidak bisa digeneralisir untuk mewakili keseluruhan populasi. Generalisasi teoritis dalam hal ini lebih dimungkinkan sebab sumber data yang digunakan lebih cenderung mewakili informasi. Karena itulah peneliti merasa penelitian ini belum cukup representatif untuk mewakili populasi informan yang ada.

Dalam penggalan data melalui wawancara dan observasi. Peneliti mengalami kesulitan mewawancarai para narasumber. Mulai dari kesulitan waktu, kurang terbukanya informasi yang dibutuhkan, atau ketidak bersedian diwawancarai dengan mengingat subjek penelitian ini masih menjabat sebagai

tokoh publik. Selain itu, peneliti juga mengalami kesulitan untuk menghubungi informan yang dibutuhkan secara langsung, terutama mereka yang masih memiliki jabatan publik seperti ; anggota DPRD kabupaten/kota, wakil Bupati, ataupun jabatan sebagai ketua partai politik. Untuk menyiasatinya, peneliti meminta bantuan informan lain sebagai mediator. Namun demikian, karena kesibukan mereka, informasi yang diperoleh kurang mendalam. Dalam observasi, karena masa reses hanya berlangsung selama 1 minggu, maka Peneliti melakukan observasi untuk masing-masing subjek penelitian ini selama satu kali setiap subjek penelitian.

Keterbatasan data hasil penelitian ini akhirnya mempengaruhi tingkat ketajaman dan komprehensifitas analisis penelitian serta penarikan kesimpulan atau konklusi dalam penelitian ini. Inilah beberapa kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini.

¹ Target Prolegnas Maksimal 44 RUU, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/dpri/11/07/19/lokvjr-target-prolegnas-maksimal-44-ruu>. Diunduh pada 14 September 2011 pukul 12.23 wib

² DPR : Perlu Reformasi Parlemen Rumah Tangga, <http://wartapedia.com/politik/dpr/3502-dpr-perlu-reformasi-parlemen-rumah-tangga.html>. Diunduh pada 14 September 2011 pukul 12.30 wib

³ DPRD Jateng Hanya Lahirkan Satu Perda Inisiatif, <http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=38211>. Diunduh pada 3 Januari 2011 pukul 16.00

⁴ DPRD Jateng targetkan lima perda inisiatif, <http://tvku.tv/v2010b/index.php?page=stream&id=675>. Diunduh pada 3 Januari 2011 pukul 16.10

⁵ RAPBD 2011 Jateng Dinilai Boros, <http://suamamerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/11/09/70109/RAPBD-2011-Jateng-Dinilai-Boros>. diunduh pada 3 Januari 2011 pukul 16.10

⁶ Konstituen adalah orang-orang yang merupakan pemilih pada pemilihan yang berlangsung pada suatu daerah. Konstituen dari anggota DPRD adalah konstituen yang telah memenuhi syarat untuk ikut dalam suatu pemilihan umum yang dilakukan oleh negara dalam rangka partisipasinya terhadap negara. Yang mempunyai hak memilih dalam Pemilu yaitu Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Syarat untuk dapat didaftar sebagai pemilih, yaitu : nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁷ Daerah pemilihan adalah daerah yang dijadikan tempat pemilih untuk memilih wakilnya sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh lembaga terkait. Daerah Pemilihan anggota DPR adalah Provinsi atau bagian-bagian Provinsi; Daerah Pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota sebagai daerah Pemilihan; Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan atau gabungan Kecamatan sebagai daerah Pemilihan.

⁸ Pasal 300 UU 27 tahun 2009 berbunyi : Anggota DPRD provinsi mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan;.
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Menaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

⁹ Pasal 74 Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2010 :

1. Masa Reses dilaksanakan selama 6 hari kerja dalam 1 kali reses
2. Masa Reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
3. Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD
4. Jadwal dan kegiatan acara selama Masa Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

-
- ¹⁰ APBD Jawa Tengah 2008, 2009 dan 2010
- ¹¹ *Reses Anggota DPRD tanpa Uang Transpor.* (2009, November 20). Suara Merdeka, 12
- ¹² *Reses Dewan Terancam Sepi Konstituen.* (2009, November 30). Meteor, 2
- ¹³ *Reses DPRD Terganggu Dana Transpor.* (2011, Maret 23). Wawasan, 14
- ¹⁴ *Reses Anggota DPRD Tanpa Uang Transport.* (2009, Desember 30). Suara merdeka, 12
- ¹⁵ *Dewan Pilih "Nombok".* (2009, Desember 1). Wawasan, 14
- ¹⁶ *Dewan Tetap Lakukan Reses.* (2009, Desember 2). Radar Semarang, 2
- ¹⁷ *Anggota Dewan Tipu CPNS.* (2011, Juni 8). Harian Semarang, 1
- ¹⁸ *Mustofa Ngumpet.* (2011, Juni 15). Warta Jateng, 1
- ¹⁹ *Itu Tindakan Pribadi.* (2011, Juni 8). Wawasan, 1
- ²⁰ "Jika sekarang integritas dan kredibilitas KPK dipertanyakan, maka harus diatasi, antara lain dengan mengganti orang yang diduga bermasalah dengan yang lebih kredibel. Jika ternyata sudah tidak ada lagi orang yang kredibel dan berintegritas untuk mengisi KPK, lembaga itu dapat dibubarkan".
- ²¹ Dian Muhtadiah Hamna, Dibalik Propaganda Marzuki Alie, dalam <http://www.fajar.co.id/read-20110811011718-dibalik-propaganda-marzuki-alie>. Diunduh pada 13 Agustus 2011 Pukul 23.23
- ²² Erna Suminar, Memahami Gaya Komunikasi Politisi, <http://politik.kompasiana.com/2011/03/06/memahami-gaya-komunikasi-politisi/>. Diunduh pada 3 Agustus 2011 Pukul 23.23
- ²³ Anita Kuswandari (2005), Tesis *Bahasa Militer dalam Komunikasi Politik SBY*, Universitas Indonesia
- ²⁴ Wahid Abdurrahman (2010), *Tesis Evaluasi Pelaksanaan Masa Reses DPRD (Kajian Terhadap Pelaksanaan Masa Reses I DPRD Jawa Tengah Tahun 2010)*. Universitas Diponegoro